

Dinamika implementasi program MBKM: preferensi mahasiswa, dukungan institusi, dan tantangan

*Ni Kadek Dwi Awidiya, Edy Herianto, Bagdawansyah Alqadri

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP Universitas Mataram

Corresponding Author: * Ni Kadek Dwi Awidiya

E-mail: saniantara91@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) policy in the Civic Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Mataram. The research employed a qualitative approach with a case study design. Informants consisted of the head of the study program, lecturers, and students selected through purposive sampling. Data were collected through questionnaires, interviews, and documentation and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The results indicate that the implementation of the three-semester learning policy outside the study program is carried out through program socialization, administrative services, academic supervision, program monitoring, and credit conversion. The most preferred MBKM activity among students is the student exchange program. Supporting factors include credit conversion systems, collaboration with partners, academic supervision, and student motivation. However, challenges include time management, academic readiness, communication with the study program, and differences in implementation mechanisms across MBKM activities.

Article History

Received: 08 March 2026

Accepted: 26 March 2026

Published: 27 March 2026

Keywords

MBKM, civic education, independent learning



PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu inovasi strategis yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi melalui pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas melalui kegiatan di luar program studi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan masyarakat. Melalui program MBKM, mahasiswa tidak hanya memperoleh kompetensi akademik, tetapi juga pengalaman praktis yang mampu meningkatkan kreativitas, kemampuan adaptasi, serta kesiapan profesional dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial dan dunia kerja (Andriyani dkk., 2023).

Secara normatif, implementasi MBKM diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi hingga tiga semester. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi lulusan melalui pengalaman belajar lintas disiplin dan lintas institusi. Dalam implementasinya, perguruan tinggi diwajibkan memfasilitasi berbagai bentuk kegiatan pembelajaran seperti pertukaran mahasiswa, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, serta program membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Berbagai bentuk kegiatan pembelajaran tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan teori yang diperoleh di kelas dengan praktik nyata di masyarakat.

Kebijakan MBKM juga dipandang sebagai upaya transformasi sistem pendidikan tinggi agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta kebutuhan dunia kerja. Melalui program ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Meke dkk. (2022) menyatakan bahwa kebijakan MBKM memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk membangun budaya belajar yang lebih mandiri dan inovatif, sehingga proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada kegiatan perkuliahan di dalam kelas. Pendapat tersebut diperkuat oleh Oksari dkk. (2022) yang menegaskan bahwa dosen perlu melakukan inovasi pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan zaman.

Dalam konteks yang lebih luas, implementasi MBKM juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Program MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh kompetensi tambahan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja melalui berbagai aktivitas pembelajaran berbasis pengalaman. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan MBKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri mahasiswa, penguatan kompetensi tambahan di luar kompetensi inti program studi, serta kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi (Herianto, Setyowati, & Nurlaela, 2024).

Meskipun kebijakan MBKM menawarkan berbagai peluang bagi pengembangan kompetensi mahasiswa, implementasinya di berbagai perguruan tinggi masih menghadapi sejumlah tantangan. Arifin dan Muslim (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan MBKM di beberapa perguruan tinggi masih memunculkan perbedaan pandangan dan kesiapan institusi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Susetyo

(2020) yang memperkirakan bahwa implementasi MBKM berpotensi menghadapi berbagai kendala, antara lain berkaitan dengan penyesuaian kurikulum, kesiapan sumber daya manusia, koordinasi dengan mitra, sistem administrasi akademik, serta dukungan pendanaan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan MBKM memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan institusional yang kuat agar program dapat berjalan secara efektif.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi MBKM sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi mahasiswa serta efektivitas sosialisasi kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan di perguruan tinggi. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai berbagai bentuk kegiatan pembelajaran dalam program MBKM sehingga mendorong keterlibatan mereka dalam program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sosialisasi kebijakan MBKM kepada mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan pembelajaran MBKM (Herianto dkk., 2023).

Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam program MBKM dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi pendampingan dan pelatihan yang terintegrasi. Program pelatihan yang melibatkan dosen pembimbing, guru pamong, dan mahasiswa terbukti mampu meningkatkan pemahaman serta kesiapan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan MBKM, khususnya pada kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan (Herianto dkk., 2024). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan institusi dan pendampingan akademik merupakan faktor penting dalam meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam program MBKM.

Dalam perspektif kelembagaan, implementasi MBKM juga berkaitan erat dengan upaya perguruan tinggi dalam meningkatkan capaian IKU. Program MBKM menjadi salah satu instrumen strategis yang dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi melalui kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman yang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam berbagai aktivitas akademik dan profesional. Sosialisasi kebijakan MBKM serta penyediaan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran menjadi langkah penting bagi program studi untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa sekaligus mendukung pencapaian IKU perguruan tinggi (Herianto dkk., 2024).

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram merupakan salah satu program studi yang telah mengimplementasikan kebijakan MBKM sejak tahun 2021. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran seperti pertukaran mahasiswa, asistensi mengajar, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai program kolaboratif dengan mitra pendidikan. Namun demikian, berdasarkan hasil studi pendahuluan, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, antara lain berkaitan dengan pemahaman mahasiswa mengenai program MBKM, mekanisme konversi nilai, kesiapan akademik mahasiswa, serta komunikasi antara mahasiswa, program studi, dan mitra pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, terdapat pula variasi minat mahasiswa terhadap berbagai bentuk kegiatan pembelajaran dalam program MBKM. Beberapa kegiatan MBKM menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Perbedaan tingkat minat tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBKM tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan institusi, tetapi juga oleh preferensi mahasiswa, dukungan program studi, serta berbagai faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai dinamika implementasi kebijakan MBKM pada tingkat program studi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan MBKM pada Prodi PPKn FKIP

Universitas Mataram dengan menekankan pada tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan kebijakan MBKM, preferensi mahasiswa terhadap berbagai bentuk kegiatan pembelajaran dalam program MBKM, serta faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik implementasi MBKM pada tingkat program studi serta menjadi bahan evaluasi bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBKM di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi PPKn FKIP Universitas Mataram. Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena implementasi kebijakan MBKM secara kontekstual berdasarkan pengalaman, persepsi, serta praktik yang terjadi di lingkungan program studi. Subjek penelitian terdiri atas unsur pimpinan program studi, dosen, dan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan program MBKM. Penentuan informan penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Kriteria informan meliputi: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program MBKM, (2) memiliki pengalaman mengikuti atau mengelola kegiatan MBKM, serta (3) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai implementasi kebijakan MBKM di program studi. Berdasarkan kriteria tersebut, informan penelitian meliputi Ketua Program Studi PPKn, beberapa dosen yang terlibat dalam pembimbingan MBKM, serta mahasiswa yang mengikuti berbagai bentuk kegiatan pembelajaran dalam program MBKM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk memperoleh gambaran awal mengenai preferensi mahasiswa terhadap berbagai bentuk kegiatan MBKM. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan penelitian untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan MBKM, faktor pendukung, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen pendukung seperti panduan MBKM, laporan kegiatan, serta data partisipasi mahasiswa dalam program MBKM.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap pola implementasi kebijakan MBKM. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian untuk menjelaskan dinamika implementasi kebijakan MBKM, preferensi mahasiswa terhadap berbagai kegiatan MBKM, serta faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Untuk memastikan keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan penelitian, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Melalui proses tersebut diharapkan data yang diperoleh

memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi sehingga mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika implementasi kebijakan MBKM pada Prodi PPKn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan MBKM: hak belajar tiga semester di luar Prodi PPKn

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi kebijakan hak belajar tiga semester pada Program Studi PPKn sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengikuti program MBKM sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Hal tersebut dibuktikan melalui komitmen Program Studi dalam melaksanakan sosialisasi terkait berbagai bentuk kegiatan pembelajaran dalam MBKM, memfasilitasi kebutuhan administrasi mahasiswa yang mengikuti program MBKM, menyiapkan dosen pembimbing, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program, serta memberikan konversi nilai sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam program MBKM. Program Studi juga berupaya meningkatkan kesiapan dosen dalam mendukung pelaksanaan program MBKM melalui pembekalan tentang MBKM, workshop pengembangan kurikulum, serta diskusi internal antar dosen. Selain itu, Program Studi turut menjalin kerja sama dengan berbagai pihak atau mitra guna menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program MBKM. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Herianto dkk (2024) yang menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan atau kegiatan pembekalan, tingkat pemahaman peserta terhadap materi mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, berbagai upaya pembekalan, sosialisasi, dan pendampingan yang dilakukan Program Studi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan MBKM.

Lebih lanjut, upaya yang dilakukan oleh Program Studi merupakan bentuk dukungan penuh dalam pengimplementasian program MBKM, sehingga mampu meningkatkan ketertarikan mahasiswa untuk mengikuti program tersebut. Hal ini dapat dilihat pada saat penelitian dilaksanakan, di mana jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM terus mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Megawati (2022) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan MBKM di Universitas Negeri Surabaya telah berjalan dengan baik melalui pemberian kebebasan kepada mahasiswa dalam memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang diminati, melakukan komunikasi yang tepat, memanfaatkan sumber daya yang ada, dispositionasi serta melaksanakan tugas monitoring dan mengawasi sistem birokrasi. Kebebasan dan dukungan ini merupakan bagian untuk memastikan implementasi kebijakan hak belajar tiga semester diluar Program Studi dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa.

Hak belajar tiga semester di luar Program Studi merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempersiapkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, perkembangan dunia industri, serta kemajuan teknologi yang berlangsung secara cepat dan dinamis. Kebijakan ini hadir sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Simatupang (2021), penyesuaian kompetensi mahasiswa dengan dinamika perkembangan zaman menjadi penting untuk mewujudkan keterkaitan (*link and match*) antara pendidikan, dunia industri, dan dunia kerja di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan sistem pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja. Penyesuaian tersebut penting dilakukan agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan

adaptasi, memiliki pengalaman praktik lapangan, keterampilan profesional, serta kesiapan menghadapi persaingan global.

Berdasarkan pemaparan tersebut, implementasi kebijakan hak belajar tiga semester di luar Program Studi merupakan langkah yang sangat penting untuk dilaksanakan karena memiliki relevansi yang tinggi terhadap pengembangan kompetensi calon guru profesional di masa yang akan datang. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih beragam, baik melalui kegiatan akademik maupun praktik lapangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Selain itu, implementasi kebijakan MBKM perlu dipersiapkan secara matang dengan perencanaan yang baik mencakup dukungan Program Studi, kerja sama dengan berbagai mitra, serta kejelasan sistem administrasi dan konversi nilai. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir hambatan atau tantangan dalam implementasi program MBKM sehingga dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Bentuk kegiatan pembelajaran yang diminati mahasiswa pada program MBKM

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden mahasiswa aktif Program Studi PPKn, diketahui bahwa bentuk kegiatan pembelajaran dalam program MBKM yang paling diminati adalah program pertukaran mahasiswa dengan persentase sebesar 50% dari total responden. Tingginya minat tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki keinginan untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas melalui interaksi akademik lintas perguruan tinggi, sekaligus mengenal sistem pembelajaran yang berbeda dan memperluas relasi sosial serta wawasan kebudayaan. Program MBKM, khususnya pertukaran mahasiswa, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, kemampuan beradaptasi, serta kemandirian dalam menghadapi lingkungan baru. Menurut Nurwadahnia dkk (2023), program pertukaran pelajar memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan tampil di depan umum, keterampilan komunikasi, kemampuan beradaptasi, kerja sama, serta meningkatkan wawasan dan kepedulian sosial melalui berbagai aktivitas dan interaksi di lingkungan kampus tujuan.

Hal ini sejalan dengan tujuan utama MBKM yang menekankan pada pembelajaran yang inovatif dan fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa serta menyiapkan lulusan unggul yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Nouborhu & Panjaitan (2023), yang menyatakan bahwa mahasiswa yang berpartisipasi dalam program pertukaran mahasiswa merdeka mendapatkan pengalaman belajar yang beragam dan berharga, melalui interaksi dengan mahasiswa dan dosen, perbedaan kurikulum, metode pengajaran yang inovatif serta memperkaya pemahaman mahasiswa tentang keragaman budaya. Maka tidak mengherankan program pertukaran mahasiswa, paling diminati karena memberikan pengalaman belajar baru di perguruan tinggi lain. Setiap perguruan tinggi tentunya memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa di luar perguruan tinggi tersebut untuk merasakan bagaimana pembelajaran di sana.

Gambar 1 persentase program MBKM



Sumber: Olahan peneliti

Selain pertukaran mahasiswa, bentuk kegiatan pembelajaran yang juga cukup diminati adalah program kampus mengajar dengan persentase yang diperoleh 33,3%, kemudian di ikuti oleh program magang atau praktik kerja dengan persentase 23,3% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa juga memiliki ketertarikan terhadap kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung dilapangan. Sementara itu, kegiatan wirausaha, proyek desa, proyek kemanusiaan, studi/proyek independen, serta penelitian dan riset memiliki tingkat minat yang relative lebih rendah, namun tetap menunjukkan adanya variasi minat mahasiswa terhadap berbagai bentuk kegiatan pembelajaran dalam program MBKM. Dengan demikian, bentuk kegiatan pembelajaran dalam program MBKM memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa. Tingginya minat mahasiswa terhadap program pertukaran mahasiswa menunjukkan kegiatan tersebut dianggap mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa. Berdasarkan pemaparan di atas, Program Studi perlu untuk memberikan dukungan terhadap mahasiswa untuk mengikuti berbagai bentuk kegiatan pembelajaran dalam program MBKM. Hal tersebut karena kebijakan MBKM memberikan pengalaman belajar kontekstual dan bermakna bagi mahasiswa.

Faktor pendukung implementasi kegiatan pembelajaran pada program MBKM

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi bentuk kegiatan pembelajaran pada program MBKM di Program Studi PPKn didukung oleh berbagai faktor yang berperan dalam menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program. Faktor pendukung tersebut tidak hanya berasal dari kebijakan dan dukungan program studi, tetapi juga dari motivasi serta kesiapan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan MBKM. Keberadaan faktor-faktor ini menjadi penting karena dapat mendorong partisipasi mahasiswa, mempermudah pelaksanaan program, serta membantu meminimalisir berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi bentuk kegiatan pembelajaran pada program MBKM di Program Studi PPKn dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengakuan SKS atau konversi nilai

Program Studi memberikan konversi nilai hingga 24 SKS bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa karena tidak terbebani kewajiban akademik tambahan, sehingga mendorong partisipasi mahasiswa dalam

berbagai kegiatan MBKM. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan akademik menjadi faktor penting dalam meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam program MBKM.

2. Pendampingan melalui dosen pembimbing

Keberadaan dosen pembimbing menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program MBKM. Dosen pembimbing berperan dalam memberikan arahan, bimbingan akademik, serta evaluasi selama pelaksanaan program. Selain itu, dosen pembimbing juga menjadi penghubung antara pihak kampus dan instansi mitra, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran sumber daya manusia, khususnya dosen, sangat menentukan keberhasilan implementasi program.

3. Motivasi internal mahasiswa

Motivasi dari dalam diri mahasiswa menjadi faktor pendukung utama dalam mengikuti program MBKM. Motivasi ini beragam, mulai dari keinginan untuk menjadi calon guru PPKn yang profesional serta dorongan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan diri. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal memiliki peran penting dalam menentukan keterlibatan mahasiswa dalam program MBKM.

4. Insentif dan pengalaman belajar di luar kampus

Keterarikan mahasiswa terhadap program MBKM juga dipengaruhi oleh adanya insentif, seperti tunjangan pada program kampus mengajar, serta keinginan untuk mengurangi kejenuhan belajar di kampus. Selain itu, mahasiswa memperoleh pengalaman baru yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan, sehingga meningkatkan minat mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan MBKM. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman kontekstual dan dukungan non-akademik turut menjadi daya tarik dalam pelaksanaan program MBKM.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Nabila dkk. (2024), menjelaskan bahwa faktor pendukung implementasi MBKM meliputi peran tim MBKM, fakultas dan program studi dalam melakukan koordinasi, adanya kerja sama dengan mitra, kebijakan rekognisi mata kuliah, serta pemberian insentif yang mendorong keterlibatan mahasiswa. Wulandari (2022), juga menyatakan hal yang selaras bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan MBKM meliputi kebijakan, sumber daya manusia pelaksana, serta kanal informasi yang memadai. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa keberhasilan implementasi MBKM tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada kesiapan sumber daya dan sistem pendukung yang mampu menunjang pelaksanaan program secara optimal. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap faktor pendukung memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada program MBKM. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan faktor-faktor pendukung ini perlu menjadi perhatian bagi Program Studi, khususnya Program Studi PPKn, agar dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan program MBKM secara berkelanjutan.

Tantangan implementasi kegiatan pembelajaran pada program MBKM

Pelaksanaan program MBKM dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi mahasiswa. Tantangan tersebut berkaitan dengan aspek akademik, teknis, maupun kondisi pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi mahasiswa dalam mengikuti program MBKM, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen Waktu

Tantangan pertama yang dihadapi mahasiswa adalah manajemen waktu. Hal ini terlihat pada pelaksanaan program kampus mengajar, dimana terdapat perbedaan kebijakan antar

Program Studi terkait kewajiban mengikuti perkuliahan. Kondisi tersebut menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam membagi waktu dan energi, sehingga pelaksanaan program kerja menjadi kurang optimal. Selain itu, pada kegiatan seperti ISS MBKM, jarak lokasi penempatan yang relatif jauh juga berdampak pada alokasi waktu mahasiswa sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan waktu menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan program MBKM. Ketidakmampuan mahasiswa dalam mengatur waktu secara efektif dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelaksanaan program serta ketercapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan.

2. Kesiapan akademik

Kesiapan akademik mahasiswa ini mencakup kemampuan dalam memahami kurikulum, menguasai perangkat pembelajaran, serta memahami mekanisme pelaksanaan program yang diikuti. Mahasiswa dituntut memiliki pemahaman yang memadai terkait tugas, alur koordinasi, serta output yang dihasilkan dari setiap kegiatan. Keterbatasan dalam aspek ini dapat berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program di lapangan, sehingga kesiapan akademik menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan MBKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesiapan akademik mahasiswa, maka semakin besar peluang keberhasilan dalam menjalankan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran MBKM secara efektif.

3. Komunikasi antara mahasiswa, Program Studi, dan pihak mitra

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan tujuan serta bentuk kegiatan MBKM kepada pihak mitra. Hal ini menyebabkan terjadinya miskomunikasi, terutama pada program asistensi mengajar dan kampus mengajar, terkait peran dan tugas mahasiswa di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejelasan informasi dan koordinasi yang efektif sangat diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, komunikasi yang tidak optimal dapat menghambat proses implementasi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

4. Perbedaan karakteristik dan mekanisme pelaksanaan pada setiap bentuk kegiatan MBKM

Setiap bentuk kegiatan dalam program MBKM memiliki karakteristik dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda, baik dari segi sistem pelaksanaan, penilaian, maupun tuntutan aktivitas yang harus dijalankan. Perbedaan tersebut mencakup variasi dalam model pembelajaran, lingkungan pelaksanaan, serta capaian yang diharapkan pada masing-masing program. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap program memiliki kompleksitas dan kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik masing-masing program menjadi penting agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Berbagai tantangan yang telah dijelaskan diatas, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti dkk (2024), yang menyatakan bahwa pelaksanaan program MBKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti mahasiswa mengalami kesulitan dalam manajemen waktu karena harus menjalankan program MBKM bersamaan dengan perkuliahan, serta akses lokasi penugasan yang sulit, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh penelitian Ramadhan dan Negawati (2022), menyatakan bahwa tantangan dalam pelaksanaan MBKM tidak hanya berkaitan dengan aspek mahasiswa, tetapi juga kelembagaan, seperti belum optimalnya pengaturan standar operasional prosedur, komunikasi yang belum konsisten antara program studi dan mahasiswa, serta keterlambatan pemberian tunjangan yang dapat memengaruhi kelancaran dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti program. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi MBKM bersifat

multidimensional, mencakup aspek individu mahasiswa maupun aspek kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan waktu yang baik, kesiapan akademik yang memadai, serta koordinasi dan komunikasi yang efektif antara mahasiswa, program studi, dan mitra agar pelaksanaan program MBKM dapat berjalan secara optimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan MBKM perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberlangsungan dan kelancaran berbagai bentuk kegiatan pembelajaran. Tantangan yang tidak ditangani secara tepat berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang muncul selama implementasi MBKM sekaligus menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab hambatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meminimalisir berbagai tantangan, sehingga pelaksanaan MBKM di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dinamika implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Mataram, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, implementasi kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi telah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh program studi, antara lain melalui kegiatan sosialisasi program MBKM, penyediaan layanan administrasi akademik bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM, penunjukan dosen pembimbing, pelaksanaan monitoring program, serta penerapan sistem konversi nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, program studi juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapan dosen dalam mendukung pelaksanaan program MBKM melalui workshop pengembangan kurikulum, diskusi akademik internal, serta penguatan kerja sama dengan berbagai mitra.

Kedua, bentuk kegiatan pembelajaran dalam program MBKM yang paling diminati mahasiswa adalah program pertukaran mahasiswa. Kegiatan ini dianggap mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih luas melalui interaksi akademik lintas perguruan tinggi, memperluas wawasan mahasiswa, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dalam lingkungan pembelajaran yang berbeda. Selain pertukaran mahasiswa, kegiatan lain yang juga diminati mahasiswa meliputi program kampus mengajar, magang atau praktik kerja, kegiatan wirausaha, proyek desa, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen, serta kegiatan penelitian dan riset. *Ketiga*, keberhasilan implementasi program MBKM pada Program Studi PPKn dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain adanya sistem konversi nilai yang jelas, komunikasi antara mahasiswa, program studi dan pihak mitra, pendampingan dari dosen pembimbing, serta motivasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan MBKM. Namun demikian, implementasi program ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan mahasiswa dalam mengatur manajemen waktu, kesiapan akademik dalam mengikuti kegiatan MBKM, komunikasi antara mahasiswa dan program studi, serta perbedaan karakteristik dan mekanisme pelaksanaan pada setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan MBKM pada tingkat program studi telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek sosialisasi program, dukungan akademik kepada mahasiswa, serta penguatan koordinasi antara program studi dan mitra agar pelaksanaan berbagai kegiatan MBKM dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan kompetensi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, H., Zubair, Muh., Alqadri, B., & Mustari, M. (2023). Implementasi Program Kampus Mengajar Angkatan 4 dan Dampaknya Terhadap Budaya Literasi Siswa di SDN 43 Cakranegara. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 452–459.
- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia. *e-Journal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1), 589-600.
- Herianto, E., Haslan, M. M., Ainun, A., Septiana, E., Aziz, S., Suryani, A. I., Sahira, E., & Novitasari. (2024). Meningkatkan partisipasi mahasiswa pada program MBKM mandiri–asistensi mengajar melalui pelatihan mandiri terintegrasi. *Jurnal Gema Ngabdi*, 6(3), 179–194.
- Herianto, E., Ismail, M., Dahlan, M., Mustari, M., & Sawaludin. (2023). Penguatan kebijakan MBKM melalui sosialisasi bagi mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PEPADU)*, 5, 1–8.
- Herianto, E., Ismail, M., Sumardi, L., Edi, M. G. P., Jumrawati, J., Hidayah, N., Yarti, S., Listianingsih, W., Soparia, A. M. Z., & Istiningsih, S. (2025). Peningkatan profesionalisme pendidik melalui pelatihan penulisan artikel ilmiah di Kota Mataram. *Jurnal Gema Ngabdi*, 7(3), 442–450
- Herianto, E., Rispawati, R., Istiningsih, S., & Asrin. (2024). Upaya meningkatkan capaian IKU perguruan tinggi melalui kegiatan SK-MBKM mandiri. *Jurnal Interaktif: Warta Pengabdian Pendidikan*, 4(1), 60–70.
- Herianto, E., Setyowati, R. R. N., & Nurlaela. (2024). Implementation of the Independent Campus Learning policy in higher education. *Journal of Civic and Moral Studies*, 9(1), 13–23. <https://doi.org/10.26740/jcms.v9n1.p13-23>
- Herlina, V. (2019). *Panduan Praktis Mengolah Data Kuisioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kemendikbud. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Meke, K, D, P., Astro, R, B., Bagenda, C., Sulaiman, S., Seda, P., Djou, A, M, G. (2022). Persepsi Mahasiswa Terhadap Desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 934-943.
- Mustari, M., & Taufiq Rahman. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Nabila, A., Faridah., Irmawati. (2024). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makasar. *Ilmu Pendidikan: Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*.
- Nouborhu, F., Panjaitan, S, M. (2023). Memperkaya Pengalaman Belajar Melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) 2022 di Universitas Pattimura Kota Ambon. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(1), 29-37
- Nur, A. C., & Muhammad Guntur. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Universitas Negeri Makasar*
- Nurwadahnia., Haslan, M, M., Kurniawansyah, E., Alqadri, B. (2023). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untuk Meningkatkan Keterampilan
- Journal of Education, Cultural and Politics*
Volume 6 No 1 2026

- dan Kreativitas Belajar Mahasiswa di STKIP Yapis Dompu. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(3), 1984-1999.
- Oksari, A, A., Nurhayati, L., Susanty, D., Wardani, G, A, P, K. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Biologi Universitas Nusa Bangsa. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*. 5(1). 78-85.
- Ramadhan, S., Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Publika*. 11(1). 1581-1592.
- Simatupang, E & Yuhertina, I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran Pada Pendidikan Tinggi. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, (1). 30–38.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Re&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susetyo. (2020). Seminar Nasional Bahasa dan Sastra. Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Open Journal System Universitas Bengkulu*. 3(1), 29-34
- UU. No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widiyanti, S, T., Hasrul., Ananda, A., Raftni, A (2024). Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Oleh Pusat MBKM Universitas Negeri Padang. *Journal of Education, Cultural and Politics*. 4(4). 751-761
- Wulandari, D., Febry, N., Hartatmaja, A, K, J., Mangula, I, S., Sabrina, O, A. (2022). Evaluasi Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Tingkat Program Studi: Studi di Universitas Paramadina. *Jurnal Ilmiah Psikologi*. 13(1), 22-40